PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 16 Maret 2017 Halaman: 13

Panwaslu Laporkan 3 Ketua PPK

● Gara-gara Menolak Rekomendasi Panwascam

YOGYA, TRIBUN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta melaporkan tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga PPK ini dilaporkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Karena diduga melanggar kode etik selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta tahun 2017.

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin menegaskan, tiga ketua PPK yang dilaporkan ke DKPP ini adalah PPK Danurejan, Gondokusuman, dan Umbulharjo. Mereka diduga melanggar kode etik PPK dengan tidak mengindahkan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk membuka kotak suara di salah satu kelurahan dari masing-masing kecamatan.

● ke halaman 14

Panwaslu Laporkan 3 Ketua

● Sambungan Hal 13

"Kami sudah melakukan klarifikasi pada ketiga PPK ini sebelum kami menyampaikan laporan ke DKPP melalui Bawaslu. Nanti keputusan pelanggaran kode etik ada di DKPP," jelasnya, Rabu (15/3).

Dia menjelaskan, laporan ke DKPP pun tidak sama waktunya antara ketiga PPK itu. Untuk PPK Danurejan dilaporkan sekitar dua pekan lalu, sedang Gondokusuman dan Umbulharjo dilaporkan sekitar sepekan lalu. Bahkan, khusus untuk PPK Gondokusuman dan Umbulharjo, laporan yang disampaikan berubah menjadi temuan Panwaslu Kota Yogyakarta.

Tidak terkait

Yasin juga menegaskan, laporan Panwaslu Kota Yogyakarta ke DKPP itu juga merupakan laporan dari masyarakat dan merupakan hasil tindak lanjut dari Panwaslu setempat. Yasin menegaskan, laporan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyampaikan, laporan ini baru disampaikan akhir-akhir ini karena harus ada beberapa tahapan dan proses yang dilalui. Panwaslu, kata Yasin juga tetap menjaga independensi dan integritas. Dia juga memastikan tidak ada batasan waktu untuk menyampaikan laporan ke DKPP. Yasin juga menambahkan, untuk sidang gugatan ke MK, Panwas Kota Yogyakarta mengatakan siap jika dimintai keterangan, bahkan Panwas sudah menyiapkan tim hukum.

Menunggu

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua PPK Umbulharjo, Suwendro mengatakan, dirinya menunggu arahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta terkait dengan laporan atas dirinya ke DKPP. Arahan dari KPU ini menyangkut tindakan setelah laporan dan apa saja yang akan dipersiapkan.

"Saya sudah memberikan keterangan kepada Panwas Kota dalam kasus tersebut. Saat ini saya juga menunggu arahan dari KPU," jelasnya.

Dia menduga masalah laporan ini timbul setelah semua anggota PPK Umbulharjo sepakat tidak membuka kotak suara seperti yang diminta Panwascam. Dia menilai keputusan PPK saat itu benar karena permintaan dari Panwascam itu tidak disampaikan ke dalam forum rekapitulasi suara, melainkan di ruang camat.

"Seharusnya disampaikan di forum rekapitulasi. Semua PPK menolak untuk membuka kotak suara," ulasnya.

Sesuai aturan dari KPU, pihaknya hanya membacakan form C1 dan menuliskannya dalam pleno. Selama tidak ada perbedaan angka dari C1 KPPS dan saksi tidak perlu membuka kotak suara. Saat proses rekapitulasi, juga dihadiri komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota, komisioner KPU DIY, dan Panwas Kota.

Sementara itu, dia mengatakan, masa tugasnya sebagai PPK akan berakhir pada bulan ini. Namun, dirinya juga tidak mengetahui apakah ada perpanjangan atau tidak karena sidang gugatan ke MK.

Hormati laporan

KPU Kota Yogyakarta menyatakan laporan Panwaslu ke DKPP terkait dugaan pelanggaran oleh tiga Ketua PPK adalah tugas, pokok, fungsi Panwaslu sebagai pengawas. Pihaknya pun menghormati laporan itu dan meminta PPK yang dilaporkan untuk menyiapkan diri dengan bukti.

"Ini persoalan personal (bukan kelembagaan). Namun, apapun itu, kami sudah memberikan arahan kepada anggota sebagai penyelenggara harus siap untuk diminta keterangan. Dan menghadapi laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban," ujar Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Rabu (15/3).

Dia menjelaskan, selama ini pihaknya sebagai penyelenggara pun sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan menjaga netralitas serta integritas. Pihaknya pun menyatakan sama dengan tugas Panwaslu, sesuai aturan pihaknya juga memiliki mekanisme untuk melakukan klarifikasi pada PPK dan KPPS yang dilaporkan.

"Kita lihat seperti apa nanti, tunggu nanti dapat tembusan," jelasnya. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005